

**SKRIPSI**

**FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENJAGA STABILITAS  
KEAMANAN DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR**

**(Studi Kasus Tawuran Antar Kelompok Di Kecamatan Tallo Kota  
Makassar)**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**RIZKA AYU LESTARI MAJID**

**E051181307**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENJAGA STABILITAS**  
**KEAMANAN DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR**  
**(Studi Kasus Tawuran Antar Kelompok Di Kecamatan Tallo Kota**  
**Makassar)**

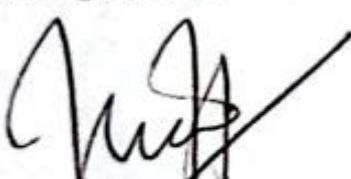
**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**RIZKA AYU LESTARI MAJID**  
**E051181307**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin

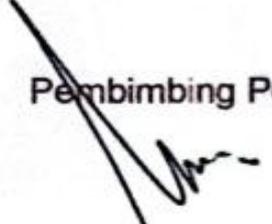
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Pembimbing Utama**

  
**Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si**  
NIP. 19570818 198403 1002

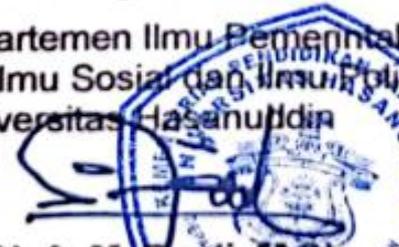
Menyetujui,

**Pembimbing Pendamping**

  
**Ashar Prawitno, S.IP, M.Si.**  
NIP. 19900110 201904 3001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si**  
NIP. 19640727 199103 1001



**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**

**FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENJAGA STABILITAS  
KEAMANAN DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR**

**(Studi Kasus Tawuran Antar Kelompok Di Kecamatan Tallo Kota  
Makassar)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**RIZKA AYU LESTARI MAJID**

**E051181307**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si

Sekretaris : Ashar Prawitno, S.IP, M.Sii

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, M.Si

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si

Pembimbing Pendamping : Ashar Prawitno, S.IP, M.Sii.

()  
()  
()  
()  
()  
()

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Rizka Ayu Lestari Majid

**Nim** : E051181307

**Judul Skripsi** : "FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM  
MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI KECAMATAN  
TALLO KOTA MAKASSAR"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Agustus 2023



Rizka Ayu Lestari Majid

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu*, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Pemerintah kecamatan Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di Kecamatan Tallo Kota Makassar.”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada keluarga tercint, kasih sayang yang tak terhingga dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua

orang tua penulis, yakni ibunda Nadirah dengan ayahanda Abd. Majid Taba, atas segala perjuangan mendidik, membesarkan penulis sampai pada saat ini, memberikan dukungan serta doa yang tulus dan tak kenal lelah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi, serta Saudara saya Kiki dan Eca yang selalu mendorong saya agar cepat menyelesaikan studi. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamter tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.

4. Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Ashar Prawitno S.Ip, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Bapak Mursalim, S.Ip dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kecamatan Tallo Kota Makassar, Kepolisian Sektor Tallo Kota Makassar, dan Koramil 1408-02/Tallo Kota Makassar, dan Satpol PP Kota Makassar.

9. Terima Kasih untuk Alfian Dermawan, Best Partner di segala situasi. Terima Kasih sudah mendampingi dan menjadi pendengar yang baik untuk segala keluh kesah penulis.
10. Terima Kasih untuk Adek Mutiara yang sudah menemani dan membantu penulis selama penelitian.
11. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan di kampus: Aiman, Dienul, Erika, Cindy, Sila, Kiki, Ilham, Mely, Fhaidza, Nuna, Raya, Aslan dan teman-teman lainnya atas kebersamaan dari Mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan.
12. Terima kasih untuk Firman Amir yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan hingga detik ini dan tetap kuat dalam setiap keadaan.

Makassar, Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRACT .....	xv
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah .....	5
1.3.Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II.....	7
2.1 Definisi Fungsi .....	7
2.2 Definisi Pemerintah .....	7
2.3 Fungsi Pemerintah .....	9
2.4 Keamanan .....	12
2.5 Fungsi Pemerintah dalam Menjaga Keamanan .....	14
2.6 Tawuran antar Kelompok.....	16
2.7 Kerangka Konseptual .....	17
3.1. Pendekatan Penelitian .....	19

3.2. Lokasi Penelitian .....	19
3.3. Infoman Penelitian .....	20
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	20
a. Observasi .....	21
b. Wawancara .....	21
c. Dokumentasi .....	21
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	22
a. Data primer .....	22
b. Data sekunder .....	22
3.6. Fokus Penelitian .....	22
3.7. Teknik Analisis Data .....	23
a. Reduksi Data .....	23
b. Penyajian Data .....	23
c. Verifikasi data .....	24
BAB IV .....	25
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	25
4.1.1 Gambaran Umum Profil Kota Makassar .....	25
4.1.2 Profil Kecamatan Tallo .....	27
4.1.3 Profil Kelurahan Bunga Eja Beru .....	33
4.1.4 Profil Kelurahan Kalukuang .....	34
4.1.5 Profil Kelurahan Tammua .....	36
4.2. Profil Instansi Obyek Penelitian .....	37
4.2.1 Kepolisian Sektor Tallo .....	37
4.2.2 Koramil 1408-02/Tallo .....	42
4.2.3 Satuan Polisi Pamong Praja .....	50

4.3. Data Penelitian Tawuran Antar Kelompok di Kepolisian Sektor Tallo Kota Makassar .....	56
4.4 Fungsi Pemerintah .....	59
4.5 Fungsi Pengaturan .....	61
4.6 Kebijakan Pemerintah Kecamatan Tallo .....	63
4.7 Tugas Pokok Pemerintah .....	67
4.8. Upaya Penyelesaian Tawuran Antar Kelompok di Kecamatan Tallo Kota Makassar .....	81
4.9. Fungsi Pengawasan .....	85
4.10. Upaya Pemerintah dalam Hal Fungsi Pengawasan .....	86
4.11 Faktor Penyebab Tawuran Antar Kelompok di Kecamatan Tallo Kota Makassar .....	90
4.11.1 Faktor Ekonomi .....	93
4.11.2 Faktor Pendidikan .....	97
4.11.3 Faktor Lingkungan .....	99
4.11.4 Faktor Ketersinggungan .....	100
4.11.5 Faktor Dendam .....	102
BAB V .....	106
5.1 Kesimpulan .....	106
5.2 Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1</b> Kependudukan Kecamatan Tallo .....	28
<b>Tabel 4. 2</b> Data Pendidikan .....	33
<b>Tabel 4. 3</b> Kasus yang ditangani di Polsek Tallo tahun 2021 .....	57
<b>Tabel 4. 4</b> Gambaran Ekonomi Masyarakat di Kota Makassar .....	96
<b>Tabel 4. 5</b> Data Pendidikan di Kecamatan Tallo Kota Makassar .....	98
<b>Tabel 4. 6</b> Data Penduduk di Kecamatan Tallo Kota Makassar .....	100



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	18
Gambar 4. 1 Peta Kota Makassar .....	26
Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Tallo .....	27
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Pemerintah .....	30
Gambar 4. 4 Peta Kelurahan Bunga Eja Beru.....	34
Gambar 4. 5 Peta Kelurahan Kalukuang.....	36
Gambar 4. 6 Peta Kelurahan Tammua.....	37
Gambar 4. 7 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tallo.....	40
Gambar 4. 8 Struktur Organisasi Koramil 1408-02/Tallo .....	44
Gambar 4. 9 Struktur Organisasi Satpol PP.....	53
Gambar 4. 10 Rapat Koordinasi Pemerintah Kecamatan Tallo.....	53
Gambar 4. 11 Rapat Koordinasi Tripika .....	53
Gambar 4. 12 Alur Analisis Kerjasama.....	53
Gambar 4. 13 Patroli Lokasi Rawan Tawuran .....	53
Gambar 4. 14 Perjanjian Perdamaian Pelaku Tawuran.....	53
Gambar 4. 15 Poskamling di Kelurahan Bunga Eja Beru.....	53
Gambar 4. 16 Poskamling di Kelurahan Kalukuang .....	53
Gambar 4. 17 Poskamling di Kelurahan Tammua .....	53

## ABSTRAK

**RIZKA AYU LESTARI MAJID**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di Kecamatan Tallo Kota Makassar (Dibimbing oleh Prof.Dr.Juanda Nawawi, M.Si dan Ashar Prawitno, S.IP, M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di Kecamatan Tallo Kota Makassar berdasar pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pemerintah membentuk kebijakan dan program keamanan yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi tawuran antar kelompok. Faktor penyebab terjadinya tawuran antar kelompok masyarakat di Kecamatan Tallo Kota Makassar didominasi dengan adanya kesalahpahaman hingga kebiasaan yang kurang baik bagi pelaku tawuran, antara lain seperti membiasakan diri bermain bersama teman hingga larut malam diluar pengawasan orang tua kemudian adanya seseorang atau pihak lain yang memancing emosi dari suatu kelompok seperti melempar dengan batu hingga akhirnya memicu emosi dari kelompok lainnya untuk menyerang dan terjadi tawuran antar kelompok.

**Kata Kunci: Keamanan, Kecamatan Tallo, Pemerintah, Tawuran**

## **ABSTRACT**

**RIZKA AYU LESTARI MAJID**, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled thesis with the title: The Function of the District Government in Maintaining Security Stability in Tallo District, Makassar City (Supervised by Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si and Ashar Prawitno, S.IP, M.Si).

This study aims to determine the function of the District Government In Maintaining Security Stability in Tallo District, Makassar City. The method used in this study is a qualitative method, ie describe the data and facts relating to the problem and studied units.

The research results indicate that the District Government's Role in Maintaining Security Stability in Tallo District, Makassar City is based on Local Regulation No. 2 of 2021 of Makassar City regarding the Implementation of Public Order and Security as well as Community Protection. The government formulates effective security policies and programs to prevent and address clashes between groups. The factors causing inter-group clashes in the Tallo District of Makassar City are dominated by misunderstandings and negative behaviors among the perpetrators of clashes, including habits like spending time with friends late into the night without parental supervision, and the presence of individuals or other parties provoking emotions within a group, such as throwing stones, ultimately triggering emotional responses from other groups, leading to clashes between groups.

**Keywords: Security, Tallo District, Government, Clashes**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang demokratis. Demokrasi pada intinya adalah suatu bentuk pemerintahan yang diciptakan oleh, untuk rakyat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, sehingga daerah-daerah yang secara geografis jauh dari pemerintah pusat dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Indonesia dikenal dengan masyarakat kosmopolitannya yang beragam. Keadaan seperti hal tersebut dapat berfungsi sebagai kekuatan perekat atau pemersatu dan elemen pemecah belah, yang menghasilkan konflik di antara orang-orang. Negara akan makmur jika potensi ini dikelola dengan baik. Namun, jika pengelolaannya buruk dan diperparah dengan dampak negatif era modern seperti sekarang ini, maka akan timbul keresahan masyarakat. Memang, konsekuensi negatif telah melahirkan kelompok-kelompok ekstremis, kadang-kadang dicirikan sebagai terorisme, atas nama berbagai kelompok, ras, dan bahkan agama, yang mengancam keamanan dan ketertiban umum Indonesia.

Keamanan dan ketertiban adalah harapan masyarakat yang mendasar ketika menjalankan bisnis sehari-hari. Akibatnya, masyarakat menginginkan rasa aman dan lingkungan yang aman bebas dari segala kegiatan, tindakan,

dan intimidasi yang mengarah dan menciptakan hal-hal yang mengganggu kehidupan sosial dan dilakukan oleh individu atau pihak tertentu lainnya.

Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan, serta dinamika perkembangan masyarakat yang pesat, perubahan sosial politik dalam negeri, dan globalisasi, yang berimplikasi pada segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemungkinan konflik regional, serta pengaruh eksternal negatif yang semakin terbuka akibat era globalisasi dan keterbukaan di berbagai bidang kehidupan, menimbulkan tantangan dalam menciptakan dan memelihara stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga kesadaran bela negara wawasan kenegaraan dan kebangsaan harus ditingkatkan dan dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Persaingan yang semakin ketat antar anggota masyarakat untuk memenuhi gaya hidup seringkali memicu berbagai jenis pelanggaran keamanan dan ketertiban. Tindakan yang melanggar norma tampak wajar. Upaya pengendalian oleh penegak hukum dan pemerintah dapat menjadi tidak efektif sebagai akibat dari skenario dilematis yang ditimbulkan oleh substansi masalah baik dari segi aparatur maupun masalah keamanan dan ketertiban. Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki sumber daya manusia yang potensial dituntut untuk meningkatkan kemampuan individu aparatnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang ditunjang dengan kemampuan aparatur pemerintahan yang lancar, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional bergantung pada kesempurnaan pemerintahan, Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014, pasal 129 ayat (4), menguraikan beberapa tanggung jawab lurah sebagai menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa, memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana pelayanan umum, melaksanakan kegiatan lainnya, tugas yang diberikan oleh camat, dan melaksanakan tugas lain dalam melaksanakan tugas daerah. Akibatnya, pemerintah dapat merangsang pelibatan masyarakat, kemudian memberi saran dan mengawasi inisiatif pemberdayaan masyarakat, dan pada akhirnya mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dari segi keamanan dan ketertiban wilayah.

Perkelahian dalam kelompok merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan aturan hukum, sangat meresahkan masyarakat, dan menarik perhatian masyarakat. Perkelahian adalah perselisihan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau sekelompok individu. Perkelahian warga menjadi semakin ganas sejak munculnya geng di masyarakat.

Sebuah perkelahian di sekitar memiliki potensi yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Akibatnya, tawuran menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran ke seluruh lingkungan. Perkelahian lokal sudah tidak terkendali. Tindakan sarkasme dan dukungan kecil untuk teman yang memiliki masalah pribadi dengan tetangga lain memicu pertengkaran luar, yang berkembang menjadi konflik antara penduduk atau organisasi.

Terjadinya tawuran dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan barang di sekitar tempat kejadian. Alhasil tawuran antar warga membuat takut dan

cemas masyarakat. Terjadinya tawuran antar warga sudah pada taraf membahayakan. Terjadinya tawuran diawali dari hal-hal yang sepele, seperti saling mengejek, membela teman yang punya masalah pribadi dengan warga lain di luar, kemudian meluas hingga menjadi konflik antar kelompok atau warga.

Kekerasan di Kota Makassar cenderung memiliki frekuensi dan tingkat kekerasan kolektif yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Data yang tersaji, secara umum dari semua jenis konflik kekerasan yang melibatkan kolektif, pada tahun 2020 di negeri ini telah terjadi sebanyak 1136 kasus kekerasan yang sempat terekam. Daerah Sulawesi Selatan berada di peringkat kedua setelah kabupaten Jawa Barat yang hanya berselisih satu kasus saja. Dari 124 jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 itu, ternyata diramaikan jumlahnya oleh kasus tawuran antar kelompok yang begitu banyak melebihi konflik kekerasan agama, politik, pengeroyokan hingga penghakiman kolektif. Dari data tersebut, 85% dari semua kasus kekerasan yang ada di Sulawesi Selatan terjadi di Kota Makassar sebagai Ibukota provinsi.

Berdasarkan pengamatan dan didukung berbagai informasi masalah stabilitas keamanan di Kecamatan Tallo dapat diidentifikasi sebagai berikut; peristiwa tawuran antar warga di Kecamatan Tallo sudah tiga tahun terjadi berulang-ulang kali apa lagi pada saat bulan Ramadhan yang dipicu karena dendam lama atau masalah yang timbul karena kesalahpahaman. Menurut Kamsah (2020) dalam satu tahun terjadi paling sedikit 14 kasus tawuran antar kelompok di Kecamatan Tallo Kota Makassar yang bisa menimbulkan korban luka-luka dan kerusakan.

Untuk memahami bahwa tawuran merupakan fenomena sosial yang sangat meresahkan masyarakat luas, maka Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh tawuran merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang.

Tentu saja tawuran ini harus diakhiri dan tidak boleh terjadi lagi karena akan meresahkan masyarakat. Perkelahian memiliki potensi untuk melukai dan mungkin membunuh individu.

Berdasarkan hasil uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Di Kecamatan Tallo Kota Makassar”.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan situasi yang dikemukakan dalam uraian di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pemerintah kecamatan dalam penanganan tawuran untuk menjaga stabilitas keamanan di Kecamatan Tallo Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tawuran antar kelompok masyarakat di Kecamatan Tallo Kota Makassar yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, latar belakang masalah, dan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan fungsi pemerintah kecamatan dalam penanganan tawuran untuk menjaga stabilitas keamanan di Kecamatan Tallo Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor penyebab tawuran antar kelompok masyarakat di Kecamatan Tallo Kota Makassar yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat melahirkan ide-ide untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya di bidang-bidang yang berhubungan dengan pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun rencana pengelolaan untuk menjamin keamanan kota.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Fungsi**

Secara umum, fungsi adalah hal-hal yang harus dilakukan secara teratur oleh seorang anggota organisasi atau pegawai pada suatu instansi sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi organisasi. Fungsi ditentukan oleh kegunaannya serta tugas yang dilakukannya.

Fungsi adalah bagian tertentu dari tugas. Fungsi adalah sekelompok operasi yang semuanya bertipe sama karena sifat, implementasi, atau faktor lainnya. Definisi ini terlihat mirip dengan definisi fungsi. Fungsi adalah deskripsi menyeluruh dari tugas-tugas yang setara atau terkait erat dan harus dilakukan oleh satu individu, yang masing-masing didasarkan pada kumpulan aktivitas serupa berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

Fungsi adalah kumpulan operasi yang semuanya bertipe sama karena sifat, implementasi, atau pertimbangan lainnya. Fungsi adalah spesifikasi yang tepat dari tugas-tugas yang setara atau terkait erat satu sama lain dan harus dilakukan oleh karyawan tertentu, yang masing-masing didasarkan pada serangkaian kegiatan serupa berdasarkan sifat atau pelaksanaan sifatnya.

#### **2.2 Definisi Pemerintah**

Istilah pemerintahan berasal dari kata government, yang mengandung arti “perintah yang mengandung dua pihak, kedua pihak mempunyai hubungan satu sama lain, pihak yang memerintah mempunyai wewenang, dan pihak yang

diperintah mempunyai ketaatan”.

Pemerintahan secara ringkas adalah suatu usaha untuk mengatur kehidupan bersama secara tepat dan tepat guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memerlukan instrumen berupa organisasi untuk melaksanakan semua konsensus yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam aspek ini, tata kelola dapat dilihat dari beberapa sudut, antara lain tindakan (dinamika), organisasi fungsional, serta tugas dan wewenang. Kegiatan pemerintahan adalah semua kegiatan terorganisir yang berakar pada kedaulatan dan didasarkan pada dasar negara, menyangkut rakyat dan negara, serta mengabdikan pada tujuan negara.

Pemerintah merupakan instrumen yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan proses pelayanan publik dan kewajiban untuk menyelenggarakan proses pelayanan publik bagi seluruh rakyat melalui kantornya dengan pemerintah, sehingga setiap masyarakat yang terlibat menerimanya sesuai kebutuhan sesuai dengan harapan masyarakat yang diperintah.

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Ia tidak dibangun untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat dan menawarkan kondisi di mana setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah adalah suatu organisasi kekuasaan yang tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, melainkan dua atau sekelompok orang dari banyak kelompok orang yang dipersepsikan oleh suatu organisasi untuk

mewujudkan tujuan bersama, dengan hal-hal yang memberikan informasi bagi masyarakat.

Akibatnya, masyarakat mengontrol dirinya sendiri secara efektif. Tidaklah pantas bagi pemerintah untuk hanya melayani dirinya sendiri, pemerintah juga harus melayani masyarakat dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kekuatan dan kreativitasnya untuk mencapai kemajuan bersama.

Dengan demikian, keberadaan pemerintah merupakan perwujudan dari keinginan rakyat agar kepentingan bersamanya dikuasai oleh pemerintah yang diakui rakyat. Pemerintah kemudian dapat mengelola layanan masyarakat, dan pemerintah memiliki nilai kemanusiaan karena mencakup gagasan kemanusiaan rakyat Yang dibutuhkan

### **2.3 Fungsi Pemerintah**

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk meredakan kekacauan yang disebabkan oleh persaingan kepentingan manusia di lokasi dan waktu tertentu. Dalam skenario ini, pengaruh seseorang mengarah pada konstruksi kelompok terkuat untuk upaya mendamaikan dan melindungi individu dan kelompok dari tindakan luar. Mereka memiliki hak untuk melakukan segala kemungkinan selama perkembangan mereka untuk memastikan perlindungan dan keselamatan mereka.

Fungsi pemerintahan dapat diartikan sebagai harapan seluruh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Badan publik yang melapor kepadanya, aparatur di semua tingkatan, dan entitas lain yang berdampak besar pada peran pemerintah secara umum.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, fungsi pemerintahan negara, termasuk pemerintahan daerah dimanapun ia berada, paling tidak harus menjalankan fungsi pelayanan (services), pengaturan (regulasi), dan pemberdayaan (empowering).

Fungsi pemerintah meliputi hal-hal seperti pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi pemerintah dari tujuan utama negara, yaitu menguasai berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi konflik di antara masyarakat itu sendiri, tidak dapat dipisahkan dari fungsi pemerintah dalam pelayanan publik. Ketika kebutuhan masyarakat menjadi lebih rumit, negara akan membutuhkan lembaga untuk melayani kepentingan ini. Meski pernyataan tersebut terlalu disederhanakan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi yang menjadi pelaksana pilihan-pilihan pemimpin politik merupakan partai yang paling aktif dalam pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari.

Dengan demikian, fungsi pemberdayaan pemerintah dapat dievaluasi dalam hal empowering dan enabling. Ketika berbicara tentang empowering. Pemberdayaan, yaitu memberi individu hak atau kesempatan untuk berbicara dan memperjuangkan tujuan mereka atau memilih masa depan mereka sendiri, adalah sebuah konsep politik. Pemberdayaan dalam arti enabling adalah proses pembelajaran yang memperkuat kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas suatu masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keutuhan bangsa.

Sedangkan karena masyarakat belum mampu memantapkan dirinya, maka fungsi pemerintah dalam hal pembangunan, merupakan fungsi ad interim. Gagasan pembangunan secara eksklusif berlaku untuk "Dunia Ketiga", yang

ditangani sesuai dengan administrasi pembangunan yang diajarkan kepada klien negara-negara di seluruh dunia (negara-negara kaya). Tidak akan ada pertumbuhan tanpa pinjaman (utang). Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan fungsi sekunder adalah memberdayakan warga negara.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk memelihara sistem pelibatan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang normal. Pemerintahan modern sebagian besar merupakan layanan masyarakat. Sehingga, fungsi dasar pemerintah secara umum yaitu:

1. Menjaga keamanan negara dari segala potensi ancaman asing, dan mewaspadaikan pemberontakan internal yang dapat menggunakan kekerasan untuk mengacaukan aturan yang sah
2. Menjaga perdamaian dengan mencegah perselisihan di antara anggota masyarakat dan memastikan bahwa setiap perubahan dalam masyarakat dilaksanakan secara damai.
3. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat terlepas dari kedudukan mereka, diperlakukan secara adil. Jaminan keadilan ini harus direpresentasikan dalam keputusan yang menafsirkan dan menegakkan konstitusi dan undang-undang terkait secara adil dan tidak memihak, dan di mana perbedaan teratasi.
4. Berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
5. Menerapkan kebijakan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan.

## 2.4 Keamanan

Secara umum keamanan adalah status seseorang dalam keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politik, emosi, pekerjaan, psikologis atau berbagai akibat dari sebuah kegagalan, kerusakan, kecelakaan, atau berbagai keadaan yang tidak diinginkan. Menurut Craven keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit dan cedera tetapi juga membuat individu merasa aman dalam aktifitasnya. Keamanan dapat mengurangi stres.

Secara etimologis, keamanan atau security berasal dari bahasa latin yaitu securus (se+cura) yang bermakna terbebas dari bahaya dan terbebas dari ketakutan. Kata ini juga dapat bermakna dari gabungan kata se yang berarti tanpa atau without dan curus yang berarti uneasiness. Apabila digabungkan kata ini bermakna liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats. Secara singkat keamanan dapat dijelaskan sebagai kondisi yang bebas dari ancaman dan bahaya. Kondisi aman ini tentunya tidak hanya diinginkan oleh negara bangsa, namun juga individu maupun kelompok. Secara terminology konsep keamanan dibagi menjadi dua. Yakni keamanan yang dilihat dari pendekatan tradisional dan keamanan dari sudut pandang non tradisional.

Keamanan adalah keadaan di mana tidak ada kerusakan atau kehancuran yang membahayakan seluruh atau seseorang dan memberikan rasa bebas dari rasa takut atau khawatir sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan, atau mereka adalah kondisi di mana tidak ada pelanggaran norma hukum.

Tertib yang mengandung arti "aturan atau tata tertib yang baik". Yang

dimaksud dengan pengendalian adalah “perbuatan dalam rangka meningkatkan ketertiban masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014. Pengendalian bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman terhadap ketertiban masyarakat, serta menjaga agar peraturan perundang-undangan pemerintah dan daerah tetap berjalan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman dan tertib dalam rangka membangun ketahanan nasional.

Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Pasal 1 Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 merupakan kondisi masyarakat yang dinamis yang menjadi salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketertiban hukum, serta terwujudnya perdamaian. Hal ini menuntut kemampuan untuk menciptakan dan meningkatkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam memerangi, mencegah, dan menaklukkan segala macam pelanggaran hukum dan penjahat.

Keamanan masyarakat merupakan harapan dasar masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Komunitas mendambakan kehidupan yang bebas dari segala macam perilaku, tindakan, dan intimidasi yang merugikan yang berkontribusi dan merusak tatanan sosial, baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain.

## 2.5 Fungsi Pemerintah dalam Menjaga Keamanan

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun keamanan bersama masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo (1995, h.18) peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut:

1. Pertama peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan.
2. Kedua timbul pengertian tentang *service state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
3. Ketiga peranan pemerintah sebagai *enterpreneur* atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi *development agent* atau unsur sebagai pembaharuan atau pembangunan.

Fungsi Pemerintah dalam menjaga keamanan, terdapat beberapa fungsi pemerintah menurut Lestari (2018) yaitu:

1. Fungsi pelayanan (*Public service*) perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan *public (Public Service)* dan pelayanan sipil (*Civil Service*) yang menghargai kesetaraan.
2. Fungsi Pengaturan (*Regulation*) pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk

perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, ataukah peraturan-peraturan yang lain. Sebagai maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3. Fungsi Pembangunan (Development) pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.
4. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment) fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

5. Fungsi Pengawasan berfungsi sebagai pengawasan di wilayahnya, dimana pengawasan ini mencakup segala aspek kehidupan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Penelitian ini memfokuskan dua fungsi dari pemerintah yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan yang lebih spesifikasi terkait upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di Kecamatan Tallo Kota Makassar terkait masalah tawuran antar kelompok.

## **2.6 Tawuran antar Kelompok**

Tawuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pertempuran besar atau pertempuran yang dilakukan secara berkelompok”. Menurut definisi ini, tawuran penduduk adalah perselisihan antar kelompok penduduk atau antara kelompok penduduk dengan penduduk lainnya. Dengan demikian, tawuran adalah pertengkaran atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau rumpun masyarakat.

Perkelahian antar kelompok masyarakat terjadi secara teratur tanpa alasan yang jelas. Konflik antar kelompok di ranah ini tidak dibatasi waktu dan bisa terjadi kapan saja. Banyak tawuran karena masalah sepele dimulai dengan orang saling mengkritik dan berakhir dengan tawuran antar geng masing-masing. Fenomena ini terjadi seduai Teori Identitas Sosial. Teori identitas sosial mengacu pada rasa memiliki seseorang terhadap kelompok yang berbagi tanggapan emosional, keterlibatan, dan kebanggaan menjadi bagian dari

kelompok itu.

Kekerasan individu berbeda dari kekerasan kelompok dalam hal pelaku dimotivasi oleh dinamika kelompok daripada balas dendam atau kebencian pribadi. Perkelahian antar kelompok adalah jenis kekerasan kolektif atau massal. Kekerasan individu tercakup dalam hukum pidana dan situasi sehari-hari, sementara agresi kolektif seringkali melampaui batas-batas hukum.

## **2.7 Kerangka Konseptual**

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2021 Kota Makassar Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, yang diciptakan melalui ketertiban dan pelindungan terhadap masyarakat.

Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Di Kecamatan Tallo Kota Makassar (Studi Kasus Tawuran Antar Kelompok di Kecamatan Tallo Kota), terdapat beberapa fungsi pemerintah menurut Lestari (2018) yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Penelitian ini memfokuskan dua fungsi dari pemerintah yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan lebih spesifikasi terkait upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di Kecamatan Tallo Kota Makassar terkait masalah tawuran antar kelompok.

Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Keamanan. Dan bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga keamanan di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Oleh sebab itu, kerangka konsep yang digunakan adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual

